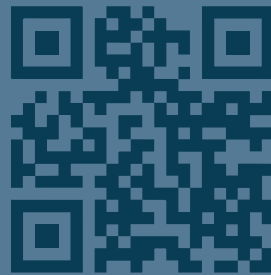


LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK
2019



**PENGAWASAN
INTERNAL**

PENGAWASAN INTERNAL

No	Kegiatan	Uraian
1	Audit/Reviu Keuangan & Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2018; 2. Melakukan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja KPK Tahun 2018; 3. Melakukan reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan dan reviu atas laporan keuangan KPK Semester II Tahun 2018; 4. Melaksanakan reviu laporan keuangan KPK Semester I Tahun 2019; 5. Melakukan reviu rencana kegiatan anggaran KPK TA 2020; 6. Melaksanakan reviu usulan revisi anggaran belanja KPK Tahun 2019; 7. Melaksanakan reviu Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2021; 8. Melakukan reviu pengelolaan anggaran triwulan IV tahun anggaran 2018; 9. Melakukan reviu pengelolaan anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2019; 10. Melaksanakan reviu pengelolaan anggaran triwulan II Tahun Anggaran 2019; 11. Melakukan evaluasi pengelolaan belanja modal KPK Triwulan I Tahun 2019; 12. Melaksanakan survei pendahuluan dalam rangka reviu program & kegiatan pada Direktorat PJKAKI dalam kurun waktu tahun 2017-2018; 13. Melaksanakan reviu kinerja kegiatan pengembangan dan pemantauan tindak lanjut hasil kajian Direktorat Litbang periode tahun 2017-2018; 14. Melaksanakan reviu kinerja atas kegiatan rekam sidang dan supporting program pada Direktorat PJKAKI dalam kurun waktu tahun 2017-2018; 15. Melakukan reviu Kinerja Pengelolaan Belanja Pegawai KPK Tahun Anggaran 2019; 16. Melakukan reviu atas pengelolaan uang persediaan pada bendahara pengeluaran pembantu Kedeputusan Penindakan; 17. Melaksanakan survey pendahuluan reviu kinerja kegiatan survey penilaian integritas (integrity assesment) pada Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah (KLOPD) periode tahun 2017-2018; 18. Melaksanakan reviu kinerja atas program dan kegiatan Pembinaan jaringan Kerja dengan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pengawasan periode tahun 2017-2018 pada Direktorat PJKAKI; 19. Melaksanakan reviu kinerja kegiatan Survey Penilaian Integritas pada Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah (KLOPD) yang dilaksanakan oleh Dit.Libang periode tahun 2017-2018; 20. Melaksanakan survey pendahuluan reviu kinerja & Keuangan Biro Hukum Tahun 2017-2018; 21. Melaksanakan survei pendahuluan reviu keuangan dan kinerja atas program dan kegiatan pada Direktorat Dikyanmas dalam kurun waktu tahun 2017-2018; 22. Melakukan pemeriksaan sehubungan dengan hilangnya barang milik negara (BMN) yang di pinjamkan kepada pegawai pada Direktorat Litbang berupa 1 (satu) unit laptop/notebook merk/tipe hp; 23. Melakukan pemeriksaan sehubungan dengan rusaknya BMN yang dipinjamkan kepada pegawai pada Direktorat Dikyanmas berupa 1 (satu) unit laptop/notebook merk/tipe Hp; 24. Melakukan reviu pengelolaan anggaran KPK triwulan III TA 2019;

No	Kegiatan	Uraian
		<p>25. Melaksanakan reviu penilaian kembali BMN dan mekanisme Take Out hasil penilaian BMN pada Laporan Keuangan TA 2018 dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018;</p> <p>26. Melaksanakan reviu dan verifikasi atas kontrak Premi Asuransi TA 2019;</p> <p>27. Melaksanakan reviu dan verifikasi atas permintaan pembayaran kekurangan Premi Asuransi TA 2018;</p> <p>28. Melakukan reviu usulan pembangunan gedung benda sitaan dan barang rampasan KPK TA 2019;</p> <p>29. Melaksanakan reviu pengelolaan barang rampasan KPK;</p> <p>30. Melakukan reviu usulan penambahan anggaran belanja pegawai KPK TA 2019</p> <p>31. Melaksanakan audit tujuan tertentu atas penyelesaian layanan permintaan dukungan produk hukum internal tahun 2016-2019;</p> <p>32. Melaksanakan reviu atas pengamanan barang rampasan pada unit Labuksi;</p> <p>33. Melaksanakan Audit Keamanan Sistem Informasi di KPK Tahun 2019;</p> <p>34. Melaksanakan reviu usulan penambahan anggaran belanja pegawai KPK TA 2019;</p> <p>35. Melaksanakan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Rumah Tangga di Biro Umum Tahun 2018-2019;</p> <p>36. Melaksanakan reviu laporan keuangan KPK TW III Tahun 2019;</p>
2	Integritas Kelembagaan KPK	<p>Penegakan Etika & Profesi</p> <p>Kegiatan penegakan etika merupakan kegiatan yang bersifat represif dimana merupakan tindak lanjut dari pengaduan baik pengaduan dari pihak internal maupun masyarakat secara umum ataupun dari hasil pengawasan terhadap pelanggaran terhadap kode etik dan kedisiplinan yang dilakukan oleh Pimpinan, Penasihat atau Pegawai KPK. Direktorat PI berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan pengaduan terkait Pimpinan, Penasihat dan Pegawai KPK yang melakukan pelanggaran kode etik. Pada tahun 2019 terdapat 29 pengaduan internal yang diterima per 30 September 2019 dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat PI.</p> <p>Sosialisasi</p> <p>Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk internal KPK. Untuk pihak internal KPK. Telah dilakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai KPK. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini seluruh pegawai semakin memahami nilai dasar, kode etik dan pedoman perilaku KPK sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran yang disebabkan kurangnya pengetahuan dari pegawai. Adapun kegiatan sosialisasi yang dimaksud diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi P4GN 2. Sosialisasi terkait kepatuhan <p>Kegiatan Urinalisis</p> <p>Kegiatan Urinalisis (pemeriksaan urine) yang dilakukan oleh Direktorat PI merupakan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kegiatan urinalisis ini dilakukan pada bulan Agustus 2019 yang diikuti oleh Pegawai KPK dengan total peserta berjumlah 70 orang.</p>

No	Kegiatan	Uraian
3	Eksaminasi Perkara TPK	<p>Pada tahun 2019, Direktorat Pengawasan Internal telah melaksanakan kegiatan eksaminasi sebanyak 3 kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan reviu proses penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) an. tersangka Tubagus Chaeri Wardana; 2. Melaksanakan reviu atas proses penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Pemerintah Kota Tangerang Selatan APBD-P Tahun Anggaran 2012 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) an. tersangka Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias TB. Chaeri Wardana B.BUS alias Wawan; 3. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap LKTPK yang belum ada Sprin Penyidikan dan kasus yang tertunda di lingkungan KPK;
4	Satgas Bidang Penindakan	<p>Kegiatan yang telah dilakukan oleh satgas bidang Penindakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan survey pendahuluan dalam rangka reviu pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi penindakan; 2. Melaksanakan reviu atas kegiatan koordinasi dan supervisi Bidang Penindakan; 3. Melakukan survei pendahuluan atas proses pengelolaan dan administrasi barang sitaan; 4. Melakukan reviu atas proses pengelolaan dan administrasi barang dan uang sitaan di lingkungan KPK;
5	Konsultasi	<p>Dalam upaya memberikan nilai tambah bagi organisasi KPK, Direktorat PI menjalankan fungsi konsultasi. Konsultasi dapat dilakukan terhadap pegawai KPK maupun unit kerja yang membutuhkan saran dan rekomendasi. Pada tahun 2018, konsultasi dapat dilakukan secara melekat dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti pemeriksaan, audit dan reviu atau merupakan permintaan khusus dari unit kerja atau individu pegawai. Selama tahun 2019, telah dilakukan 26 kegiatan konsultasi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat terkait uang tunai sitaan hasil penggeledahan di Cabang Rutan KPK; 2. Saran dan pendapat pembebanan biaya terhadap 18 unit Apartemen Puri Kasablanka; 3. Permintaan pendapat dalam permasalahan pengadaan barang dan jasa dan usulan pengenaan sanksi daftar hitam; 4. Permintaan Pendapat Hukum; 5. Permintaan Rekomendasi Asimilasi Kerja Sosial dan Pembebasan Bersyarat Narapidana TPK atas nama Fahd L. Fauz; 6. Konsultasi terkait kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan kerjasama dengan perusahaan swasta-dengan Dikyanmas.
6	Koordinasi dengan Penegak Hukum terkait Penyalahgunaan Nama Lembaga KPK	<p>Selama tahun 2018, telah ditindaklanjuti 10 (sepuluh) laporan pengaduan masyarakat terkait oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK dan menyalah gunakan nama KPK sebagai upaya mencegah maraknya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK, Pimpinan KPK menerbitkan Surat Edaran Baru Nomor: B-933/PI.05/01-42/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Para Gubernur Seluruh Indonesia, Para Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia, Para Ketua DPRD, dan Umum terkait dengan maraknya oknum/ LSM yang menggunakan atau mengatasnamakan KPK untuk mendapatkan suatu keuntungan baik bagi perorangan/ kelompok tertentu. Disamping itu Direktorat Pengawasan Internal melakukan koordinasi dengan APGAKUM setempat dalam penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut.</p>

No	Kegiatan	Uraian
7	Dukungan dan Pengembangan Pengawasan	<p>Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Pengawasan Internal KPK upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan yang berkelanjutan melalui peningkatan level kapabilitas <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>.</p> <p>IACM merupakan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan bagi terwujudnya unit pengawasan internal yang efektif pada sector publik. IACM menggambarkan jalur perbaikan yang perlu diikuti oleh organisasi sektor publik dalam mengembangkan unit pengawasan internal yang efektif, memenuhi harapan profesional dan kebutuhan tata kelola organisasi. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas (IACM) secara mandiri yang dilakukan bekerjasama dengan BPKP kapabilitas Direktorat PI berada pada level-3 dari 5 level. Direktorat Pengawasan Internal bertekad dan berupaya untuk menuju level-4 IACM pada tahun 2019. Target ini lebih cepat dari target RPJMN 2015-2019 yang mewajibkan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) mencapai level ke-3 pada tahun 2019.</p> <p>Kegiatan lain yang telah dilakukan dalam hal pengembangan dan perbaikan organisasi pengawasan internal adalah menyusun prosedur pelaksanaan monitoring tindak lanjut, memperbaharui proses bisnis Direktorat PI, Penyusunan draft Perkom PUPI 2019, <i>Self Assessment</i> Maturitas SPIP, dan <i>Self Assessment</i> QAIP.</p>